SRIUSIN : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial
Vol. 1 No. 1, Januari 2022
DOI:

p-ISSN:
e-ISSN:

Article history : Submitted 08 January 2022 ; Accepted 13 January 2022; Available online 31 January 20222

Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan: Pengaruh Mataram Hingga *Jihad fi Sabilillah*

Tedi Suandika
tedikuangdalam@gmail.com
Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia
SMAN 2 Rambang Kuang

Kata Kunci:
Kemanunggalan Sipil dan Militer; Kesultanan Palembang Darussalam; Kesultanan Mataram Islam; Pemimpin Pasukan; Jihad fi Sabilillah.

Abstrak
Setelah keruntuhan Sriwijaya, Palembang berada di bawah pengaruh Jawa, berturut-turut menjadi vassal Majapahit, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram Islam sebelum kemudian berdiri secara independen menjadi Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1659. Rumusan masalah dari tulisan ini akan menjawab, "*bagaimana bentuk kemanunggalan sipil dan militer pada masa kerajaan hingga kesultanan Palembang ?*". Penelitian ini membuktikan bahwa sebagaimana dicatatkan oleh orang Belanda yang mengikuti armada '*Verenigde Oost-Indische Compagnie*' (VOC) saat menginvasi Palembang, disebutkan sejumlah jabatan sipil yang menjadi pimpinan pasukan Palembang seperti '*Orang Kay*' (Orang Kaya), sedangkan '*Quevy Tommagen Nadapen Radia* (Kyai Tomenggong Dihadapan Raja)' dan '*Quevy Nabey (Kyai Ngabehi)*' menyerupai gelar pejabat Bupati Pasisiran Kesultanan Mataram Islam di Jawa yakni 'Tumenggung', 'Kyai Demang' atau 'Kyai Ngabehi'. Setelah Kesultanan Palembang berdiri, Belanda melakukan invasi yang dikenal sebagai 'Perang Menteng' (1819), para pengikut Tarekat Sufi Sammaniyah ajaran Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani turut mempertahankan Palembang dengan melancarkan '*Jihad fi Sabilillah*', tercatatlah saat itu gelar 'Haji' sebagai predikat relijius non-militer yang ikut memimpin pasukan melawan serangan Belanda.

Keywords:
Civil and Military Unity; Palembang Darussalam Sultanate; Islamic Mataram Sultanate; Troops Leader; Jihad fi Sabilillah.

Abstract
After the collapse of Sriwijaya, Palembang was under Javanese influence, successively becoming a vassal of Majapahit, the Sultanate of Demak, and the Sultanate of Mataram Islam before being independent as the Sultanate of Palembang Darussalam in 1659. The formulation of the problem in this paper will answer, "what is the form of civil unity? and the military during the kingdom to the Palembang sultanate?". This research proves that as recorded by the Dutch who joined the 'Verenigde Oost-Indische Compagnie' (VOC) fleet when it invaded Palembang, it was mentioned that a number of civilian traditional positions were the leaders of the Palembang troops such as 'Orang Kay' (the Rich), while 'Quevy Tommagen Nadapen Radia (Kyai Tomenggong Before the King)' and 'Quevy Nabey (Kyai Ngabehi)' resemble the official titles of the Pasisiran Regent of the Islamic Mataram Sultanate in Java, namely 'Tumenggung', 'Kyai Demang' or 'Kyai Ngabehi'. After the Sultanate of Palembang was established, the Dutch carried out an invasion known as the 'War of Menteng' (1819), the followers of the Sufi Order of Sammaniyah teachings of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani helped defend Palembang by launching 'Jihad fi Sabilillah'. It was recorded at that time the title 'Haji' as religious predicate (non-military title) who helped lead the troops against the Dutch attack.

Pendahuluan

Artikel ini di usahakan sebagai sebuah pengungkapan atas kesejarahan yang menjadi peristiwa masa lampau di bumi Sriwijaya, sekarang wilayah ini disebut sebagai provinsi Sumatera Selatan. Memang, kesatuan wilayah kerajaan Sriwijaya tentu lebih luas lagi di masanya, tetapi warisan kesejarahan yang otentik masih tetap bersemayam di Sumatera Selatan dengan ibukotanya yakni Palembang. Sebagai sebuah kota tertua di Sumatera, Palembang tetap eksis dalam alur zaman kesejarahan yang tak jarang ikut merubah batas-batas administratif-geografis maupun corak peradabannya. Setelah melewati era kuno (Hindu-Budha), Palembang sebagai tempat ditemukannya prasasti yang merekam "Jayasidhayatra" (perjalanan Jaya) Dapunta Hyang disertai puluhan ribu bala tentara yang lengkap dengan perbekalannya dan berhasil Marvuat Wanua atau mendirikan pemukiman.[1] Perjalanan sejarah membawa kota ini memasuki era selanjutnya, yakni penguasaan Majapahit yang ditandai oleh ekspedisi pada tahun 1377 M,[2] aneksasi Demak hingga Mataram yang berujung pendirian kesultanan Palembang (1659 M) oleh Susuhunan Abdurrahman dan cengkeraman kolonialisme yang menghantarkan penghapusan kesultanan ini pada tahun 1825 M.[3]

Palembang dan peradaban tuanya tidak pernah bisa dilepaskan dari model sinergisitas militer dan non-militer (sipil). Wajar saja, dalam sejarah tertua umat manusia tercatat bahwa organisasi militer permanen (professional) pertama di dunia dibentuk antara 1580-1557 SM oleh Pharaoh Amosis.[4] Tentara ternyata lahir dari buah kepemimpinan seorang raja, ini merupakan satu model tertua yang akan terus membentuk pola pengikat elemen sipil dan militer. Apabila selama ini penulisan mengenai kesejarahan militer lebih menekankan kepada usaha merekam pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Sumatera Selatan beserta tokoh, penyebab, pihak yang terlibat, jumlah kekuatan, jalannya perang hingga akibat yang menjadi konsekuensi dari pertempuran-pertempuran itu, maka di sini akan lebih ditekankan mengenai aspek corak pemikiran mengenai kemanunggalan dua elemen tersebut di atas. Maka, tulisan ini akan berfokus pada peristiwa pertempuran Kerajaan Palembang yang menjadi bawahan kerajaan Mataram melawan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Pada bagian ini penulisan dikembangkan dari sebuah artikel berjudul "***Perang 1659 dan Pengaruh Mataram Islam dalam Kemiliteran Palembang***" yang telah terbit di Pagaralam Post pada 21 Desember 2017 lalu, tulisan tersebut berfokus pada pengaruh Mataram Islam dalam aspek kemiliteran Palembang.[5] Selanjutnya, penulisan berfokus pada era setelah Kesultanan Palembang berdiri pasca merdeka dari pengaruh Mataram Islam, terutama di masa terjadinya

---

[1] Museum Balaputra Dewa Palembang, *Koleksi Arkeologika Museum Balaputra Dewa*, Palembang : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, 2010.h.49.

[2] J.J. Ras, *Masyarakat dan Kesusatraan di Jawa*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014.h.125.

[3] M. Junus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jakarta : Departemen Kebudayaan RI, 1995.h.654.

[4] Dyah Novieta, Handayani, *Bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia*,Jakarta : Erlangga, 2008.h.4.

[5] Tedi Suandika dan Arafah Pramasto, "Perang 1659 dan Pengaruh Mataram Islam dalam Kemiliteran Palembang", Pagaralam Post pada 21 Desember 2017.

Perang Menteng (1819). Rumusan masalah yang akan dijawab adalah : bagaimana bentuk kemanunggalan sipil dan militer pada masa kerajaan hingga kesultanan Palembang ?.

Metode Penelitian

Riset ini memakai metode historis atau metode penelitian sejarah, yaitu sebuah proses penulisan kisah atau peristiwa/kejadian masa lalu berdasarkan sumber-sumber atau peninggalan. Prosedur yang dipakai di sini ialah :[6]

1. Mencari jejak-jejak masa lampau;
2. Meneliti jejak-jejak tersebut secara kritis;
3. Bedasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-jejak itu, berusaha dibayangkan bagaimana gambaran masa lampau;
4. Menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif tentang masa lampau sehingga sesuai dengan jejak-jejak tetsebut.

Secara populer, metode historis dirumuskan dalam berbagai istilah meski dalam urutan langkah-langkh yang relatif sama. Dikutipkan oleh Sugeng Priyadi dari Notosusanto (1978) dan Gottschalk (1983), langkah-langkah penelitian sejarah meliputi : 1) heuristik (mencari sumber-sumber), 2) kritik atau analisis (menilai sumber-sumber), 3) interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan 4) historiografi (penulisan sejarah).[7] Sumber-sumber utama yang diteliti dalam riset ini adalah buku-buku yang berisi ulasan-ulasan berguna tentang sebuah topik maupun juga bibliografi, pemeriksaan atas bibliografi-bibliografi buku bacaan dimaksudkan untuk memperoleh referensi-referensi ilmiah.[8]

Pembahasan

1. Pengaruh Mataram dalam Kemiliteran Palembang

Sebagaimana dicatatkan, masuknya pengaruh Mataram Islam tidak lepas dari posisi strategisnya yakni selaku kota dengan transportasi sungainya yang terletak dekat dengan Pantai Timur Sumatera sehingga dapat mempermudah menuju perdagangan laut yang utamanya ialah ke Malaka. Pada sekitar abad ke-16 jaringan perdagangan secara unik menepatkan Malaka dapat berhubungan dengan pulau-pulau di Nusantara. Sejarawan Ricklefs dalam buku *Sejarah Indonesia Modern* mengutipkan Tome Pires yang mencatatkan trayek-trayek utama dalam perdagangan dari dan ke Malaka salah satunya adalah dengan

---

[6] Dedi Irwanto dan Alian Sair, *Metodologi dan Historiografi Sejarah : Cara Cepat Menulis Sejarah* , Jogjakarta:EJa_Publisher, 2014.h.12.
[7] Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* , Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2012.h.3.
[8] William Kelleher Storey, *Menulis Sejarah:Panduan Untuk Mahasiswa* , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.h.9.

Pantai Timur Sumatera dengan penghasilan utamanya yakni emas. Saat itulah, ketika Mataram Islam mencapai kejayaan di bawah Sultan Agung (1593-1645) meminta ketundukan Palembang pada otoritas Jawa, demikian tulis Ki Sabdacarakatama dalam buku '*Ensiklopedia Raja-raja Tanah Jawa*', konon saat itu Mataram mewajibkan upeti emas selain juga persembahan berupa gajah dari Palembang setiap tahunnya.[9]

Kemanunggalan militer dan sipil kita dapati dari kisah pertempuran antara kerajaan Palembang yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Jawa melawan VOC. Peperangan ini dipicu oleh terbunuhnya perwakilan VOC bernama Conelius Ockerz yang dianggap tidak hormat pada pemimpin setempat. VOC melalukan pembalasan atas pembunuhan itu dengan mengirimkan ekspedisi militer pada 19 Oktober 1659 di bawah laksamana John Vander Laen. Menurut catatan Nieuhof, seniman yang ikut dalam ekspedisi itu, didapati beberapa gelar mereka yang menjadi pimpinan pasukan Palembang seperti *Orang Kay* (orang kaya) yakni kelas bangsawan /pejabat di dunia melayu Islam. Adapula gelar "*Quevy Tommagen Nadapen Radia*" (kyai Tomenggong Dihadapan Raja), serta "Quey Nabey" (Kyai Ngabehi).[10] Palembang merupakan daerah yang juga dipengaruhi budaya Jawa selain Melayu, tidak heran jika dua nama gelar terakhir itu (Quevy Tommagen Nadapen Radia dan Quey Nabey) ialah menyerupai gelar pejabat Bupati Pasisiran (Syahbandar) era Mataram Islam yang berpangkat Tumenggung, Kyai Demang atau Kyai Ngabehi.[11] Gelar-gelar itu dimiliki oleh pejabat-pejabat sipil.

Mengingat bahwa Palembang hingga perang melawan VOC pada tahun 1659 itu berada di bawah kekuasaan Mataram Islam, maka kita perlu menilik bagaimana sistem kemiliteran pada masa itu di negeri induk yang membawahi Palembang yakni di Jawa. Dominasi militer Mataram Islam sangat diakui di Pulau Jawa. Jan Pieterzoon Coen selaku pemimpin VOC di Batavia mencatatkan pada tahun 1615 bahwa :

> "*Pangeran Banten tidak takut pada orang Portugis, Spanyol, Belanda, atau Inggris mana pun, tapi hanya kepada (Raja) Mataram. Jika Mataram menyerang, katanya, tidak seorang pun yang sanggup melarikan diri. Tapi terhadap para penyerang lainnya, gunung-gunung sudah cukup bagi kami, mereka tidak bisa mengejar kami ke sana dengan kapal-kapal mereka.*"[12]

"Rahasia" dari kedigjayaan militer Mataram Islam ialah terletak pada kemampuan untuk mengerahkan kekuatan manusia yang berjumlah banyak. Tidak sebatas kepada jumlah saja, Mataram Islam juga menerapkan sistem pertahanan dengan memfungsikan sumber daya manusia yang besar terutama elemen sipilnya dalam struktur kemiliteran. Pada masa Mataram Islam yang puncaknya berada di bawah Sultan Agung, setiap desa sedikitnya harus memiliki seratus prajurit yang tangguh dan Kepala Desa atau

---

[9] Arafah Pramasto, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya), Bandung:Ellunar Publisher, 2018.h.14.

[10] Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I : Tanah di Bawah Angin, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014.h.151.

[11] Sutrisno Kutoyo, Sejarah daerah : Derah Istimewa Yogyakarta, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.h.96.

[12] Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I : Tanah di Bawah Angin, h.140.

Lurah harus merangkap menjadi komandan sebuah seksi, karena itu Kepala Desa disebut Penatus artinya 'Pemimpin dari Seratus Prajurit'. Tiap Kecamatan harus memiliki seribu prajurit tangguh dan Camat wajib merangkap menjadi komandan satu Batalyon, karena itulah seorang Camat disebut Panewu artinya 'Pemimpin dari Seribu Prajurit'. Mataram Islam tentunya memiliki prajurit reguler yang disebut sebagai Wiraraja (Pengawal Raja) yang termasuk di dalamnya ialah pasukan Singasari (Pengawal Kaputren), dan elemen regulernya yang bertugas melawan musuh ialah Wirasinga. Pasukan Wirasinga ini dibantu oleh pasukan-pasukan cadangan yang disebut pasukan Wiratani –sehari-hari bekerja sebagai petani – yakni pasukan dari kalangan penduduk desa yang dipimpin oleh Penatus atau Penewunya.[13]

Namun secara umum, hampir tidak dipisahkan secara jelas di masa Mataram Islam itu mengenai kewenangan sebagai pemimpin sipil maupun militer karena sistem feodalisme yang kuat sehingga penguasa sipil sekalipun dapat sewaktu-waktu dapat menjadi pemimpin militer. Sebuah contoh di antaranya dapat kita lihat tatkala Mataram Islam hendak menaklukkan Madura. Dalam Babad Tanah Jawi disebutkan figur Panglima Mataram bernama Jaya Supanta sebagai penglima perang yang berhasil menguasai Tuban. Tumenggung Jaya Supanta kemudian diberi gelar Dipati Sujana-Pura. Adipati baru ini mendapat tugas lagi, yaitu menaklukkan Madura dengan disertai seluruh bupati Pasisiran dengan bala-pasukannya.[14] Tidak mengherankan jika dalam sejarah Madura, Sujana-Pura lebih dikenal sebagai seorang Bupati (jabatan sipil). Kemiliteran profesional ala era modern memang belum dikenal pada masa itu sehingga "Kemanunggalan" elemen sipil-militer lebih disebabkan oleh struktur tradisional-adat dalam lingkup kekuasaan feodal maka pemimpin sipil cenderung memiliki kuasa untuk mengerahkan orang-orang untuk tujuan militer. Demikian itulah pola yang terjadi di Palembang dalam pertempuran melawan VOC pada tahun 1659, tak heran jika orang-orang dengan jabatan sipil menjadi bagian dari elemen pertahanan militer pada masa itu.

2. Kesultanan, Jihad, dan Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani

Tradisi historis Islam menurut Imam Yahya, M.Ag kemiliteran dibagi menjadi dua, yakni Militer Murtaziqoh yang resmi diberikan gaji tetap oleh negara, para anggotanya dipersiapkan secara khusus untuk menghalau musuh-musuh yang akan menduduki negara. Karena secara resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan keamanan, sebagai konsekuensinya mereka harus siap setiap saat untuk berperang apabila negara dalam keadaan bahaya.[15] Wahbah Zuhaili mengutipkan hadits berbunyi "Perumpamaan orang yang berperang di jalan Allah yang mengambil upah untuk menguatkan diri menentang musuh, adalah seperti

[13] Ki Sabdacarakatama, Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa, Yogyakarta : Narasi, 2010.h.89.
[14] W.L. Olthof (Penyusun), Babad Tanah Jawi : Mulai dari Nabi Adam Sampai Pangeran Purbaya, Yogyakarta : Narasi, 2016.h.267.
[15] Imam Yahya, Tradisi Militer dalam Islam, Yogyakarta : Logung, 2004.h.45.

ibu Musa AS menyusui anaknya." Sedangkan untuk kekuatan cadangan militer terdapat sistem Mutatowi'ah atau militer semesta – menyerupai SISHANKAMRATA – yang diisi oleh mereka (rakyat sipil) atas dasar kesadaran dan kemauan dalam rangka ikut serta mempertahankan negara.[16] Menurut Imam Yahya, M.Ag adanya Militer Mutatowi'ah ini ialah karena Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan bangsanya karena keanekaragaman suku maupun ras merupakan kekayaan alami dari Allah SWT.[17] Rasulullah pada masa kenabiannya di Madinah pun mengalami kehidupan bermasyarakat yang plural; terdapat banyak suku dan agama lain contohnya adalah Yahudi. Militer harus terorganisir resmi atau tidak lepas dari elemen sipil, entah sebagai alat pemerintah (secara vertikal) maupun dengan masyarakat umum (secara horizontal).

Saat Palembang telah menyatakan diri sebagai kesultanan berdaulat yang lepas dari pengaruh Mataram Islam pasca perang melawan VOC tahun 1659 itu, kembali lagi terjadi pertempuran melawan pihak asing yaitu pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fase ini sering diabaikan oleh para pemerhati sejarah Palembang yang sesungguhnya dalam kondisi itu justru muncul figur agamawan, pemikir, dan ahli Tasawuf dengan keparipurnaan pengetahuannya hingga sosok ini turut memperhatikan bidang pertahanan. Tidak seperti kebanyakan asumsi masyarakat dewasa ini yang kerap menjustifikasi bahwa semangat keagamaan dalam konteks *Jihad fi Sabilillah* sebagai "Ekstrimisme" yang mengarah pada kudeta berdarah untuk menargetkan para aparatur negara guna mendirikan negara baru berbasis agama Islam. Meski tidak bisa pula dipungkiri tentang eksistensi kaum ekstrimis di Indonesia yang mengusung gagasan serupa, sesungguhnya kita perlu mempelajari pemikiran tokoh Palembang ini. Dialah Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani, Ulama-Literati Palembang yang tergolong sebagai pemikir militer lokal pada beberapa abad silam yang telah mampu mengusung gagasan kemanunggalan elemen sipil dan militer untuk melawan penjajahan.

Syaikh Abdus Shamad pun setuju dengan bentuk sinergisitas antara kekuatan sipil yakni pemimpin politik dengan masalah Jihad fi Sabilillah . Mal An Abdullah (2015 : 59) mencatatkan dalam sebuah surat Syaikh Abdus Shamad – saat itu beliau berkarir dan tinggal di Haramain –kepada Sultan Hamengkubuwono I yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda di Semarang pada 22 Mei 1772, Syaikh menguatkan bahwa Tuhan telah menjanjikan bahwa para sultan akan memasuki surga karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka melawan para penjajah. Surat yang dikirimkan Syaikh Abdus Samad itu disertai rekomendasi dua orang Haji untuk jabatan di Mataram dan beliau menyertakan bersama mereka sejumlah kecil air zamzam untuk Sultan.[18]

---

[16] Wahbah Zuhaili, Atsaru Al-Harb fi Al-Islam Dirasah Muqoronah, Damaskus : Dar Al-Fikr,1962.h.43.
[17] *Op.Cit.* h.48.
[18] Mal An Abdullah, *Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani : Biografi dan Warisan Keilmuan*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2015.h.60.

Syaikh Abdus Shamad tetap mengakui eksistensi politik seorang raja sebagai pemerintah yang sah untuk dihimbau selalu teguh dalam melawan penjajahan. Dalam konteks perjuangan negeri-negeri Nusantara saat itu, nilai keagamaan adalah motor penggerak perlawanan para penguasa, prajurit, dan rakyat melawan penetrasi bangsa-bangsa Barat, yang mana antara dua pihak berhadapan itu memiliki perbedaan etno-relijius. Pun begitu, Syaikh Abdus Shamad tidak pernah mencoba untuk menggalang kekuatan rakyat Muslim atas namanya sendiri – tanpa berkoordinasi dengan penguasa – guna mengusir penjajah. Jelas ini berbeda dengan para ekstrimis masa kini yang tak segan melawan pemerintah resmi demi sebuah 'cap' (label) "*Jihad fi Sabilillah*". Syaikh Abdus Shamad tetap yakin pada sistem pemerintahan setempat dalam himbauan ini agar tidak merusak tatanan yang ada dengan memberi kontribusi pemikiran maupun dukungan spiritual (berupa jimat , air zamzam, dan doa). Predikat "Ulama Militan dan Pengarang", Syaikh Abdus Shamad dikenal dengan karyakaryanya yang tak kurang dari delapan buah kitab, dua masterpiece (mutu manikam)-nya adalah *Siyar As-Salikin* dan *Hidayatus Salikin*. Satu karya lainnya yang ditulis Syaikh yakni *Nasihat Al-Muslimin wa Tadzkirat Al-Mu'minin* ikut menyerukan pentingnya Jihad seperti halnya dalam surat beliau yang telah dinukilkan sebelumnya.[19] Bukan mustahil munculnya pemikiran ini telahmengibarkan perlawanan umat Islam di beberapa negeri Melayu.[20]

Pengaruhnya secara nyata adalah "Kemanunggalan" komponen sipil dan militer seamasa peperangan melawan ancaman penjajahan yang dilancarkan kepada Kesultanan Palembang oleh pihak Kolonial Belanda. Apakah sinergisitas itu sebatas menyatukan kekuatan politik dan angkatan bersenjata kesultanan ? Bukan ! Bahkan manunggalnya unsur-unsur masyarakat termasuk komunitas relijius yakni para praktisi tarekat (ordo) Sufi. Sejak masa Syaikh Abdus Shamad, faham tarekat yang dominan dan diikuti secara umum (ulama, lingkungan keraton, dan masyarakat) di Palembang ialah aliran Sammaniyah. Melalui Tarekat Sammaniyah ini, gagasan 'Sufisme Baru' atau Neo-Sufisme yang digagas Syaikh Abdus Shamad justru menunjukkan watak aktivisme sosial yang nyata ; berbeda dengan gagasan 'Sufi Lama' yang cenderung menafikan kehidupan sosial. Perlawanan Palembang menghadapi ekspedisi militer pasukan Belanda pada tahun 1819 –disebut "Perang Menteng" – dimotori oleh para pengamal tarekat ini sebagaimana yang diabadikan dalam Syair Perang Menteng. Syair ini memuat keterangan keterlibatan para tokohnya yang bergelar 'Haji' (predikat relijius non-Militer / sipil) berikut juga nama Haji Zen (Kiagus Muhammad Zen) yakni Khalifah (pemimpin tarekat) sekaligus menantu Syaikh Abdus Shamad :[21]

Delapan belas harinya Sabtu

---

19 Arafah Pramasto, "Kontribusi Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani pada Aspek Intelektual Islam di Nusantara Abad ke-18", Tsaqofah & Tarikh, Vol. 4 No. 2, Juli - Desember 2020 : 103-104.

20 Abd. Azim Amin, Syaikh Muhammad Azhari Al-Palembani : Ulama Panutan Abad Ke-19 di Nusantara, Palembang : Rafah Press, 2009.h.6.

21 Mal An Abdullah, *Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani : Biografi dan Warisan Keilmuan*, h.110.

Bulan Sya'ban ketika itu

Pukul Empat jamnya itu

Haji berdzikir di pemarakan tentu

Haji Ratib di pengadapan

Berkampung bagai mendagap ayakan

Tidaklah ada malu dan sopan

Ratib berdiri berhadapan

La ilaha ila Allah dipalukan ke kiri

Kepada hati nama sanubari

Dataglag opsir memeriksa berdiri

Haji berangkat opsir pun lari

Diikutilah segala Haji yang garang

Haji Zen kepalanya sekarang

Itulah mula jadi berperang

Di Kuto Lama sampai diserang

Kaum agamawan serta komunitas relijius turut bersatu dengan kekuatan kesultanan dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsanya. Tahun 1819 masing-masing pada bulan Juni dan Oktober, Palembang dengan sukses memukul mundur invasi militer Kolonial Belanda, meskipun pada invasi selanjutnya yakni pada 1821 Belanda memperoleh kemenangan yang menyebabkan disfungsi Kesultanan Palembang hingga akhirnya kesultanan ini dihapuskan pada tahun 1825.[22] Keruntuhan Palembang ini disebabkan adanya friksi internal kalangan politik kesultanan yang melemahkan perjuangan melawan penjajahan.

Kesimpulan

Alur sejarah Palembang dan Sumatera Selatan sejak masa Kerajaan Palembang sampai Kesultanan Palembang memiliki sisi urgensi tersendiri untuk dipelajari, karena pada rentang waktu tersebut, kekuatan asing (Bangsa Barat) tengah melakukan penetrasinya di wilayah Nusantara yang mana Palembang sendiri turut mengalami ancaman kolonialisme serta bahkan militerisme yang mereka gencarkan. Sinergisitas Sipil-Militer sejatinya telah kita dapati pada masa Kerajaan Palembang (bawahan Mataram Islam), namun "Kemanunggalan" yang tercipta kala itu lebih disebabkan oleh tatanan Feodalistis yang menyebabkan seorang tokoh sipil dapat merangkap sebagai pemimpin mililter. Ketika Palembang memasuki era

[22] Arafah Pramasto, " Relijiusitas-Moderat dan Kemajuan perdagangan Palembang 1825-1856", Tribun Sumsel 19 Juni 2017.

kesultanan, "Kemanunggalan" Sipil-Militer membentuk prototipe yang ideal karena kaum agamawan mengambil posisi penting dalam menyumbangkan pemikiran serta secara aktif mengerahkan kekuatan mengusir para penjajah, tetapi karena konteksnya yang lokal (sebatas Kesultanan Palembang), maka masa ini belum pula secara holistik didapati nilai idealnya untuk cakupan wilayah yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Amin, Abd. Azim, *Syaikh Muhammad Azhari Al-Palembani : Ulama Panutan Abad Ke-19 di Nusantara*, Palembang : Rafah Press, 2009.

Handayani, Dyah Novieta, *Bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia*,Jakarta : Erlangga, 2008.

Irwanto, Dedi, Alian Sair, *Metodologi dan Historiografi Sejarah : Cara Cepat Menulis Sejarah* , Jogjakarta:EJa_Publisher, 2014.

Kutoyo, Sutrisno, *Sejarah daerah : Derah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.

Mal An Abdullah, *Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani : Biografi dan Warisan Keilmuan*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2015.

Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta : Departemen Kebudayaan RI, 1995.

Museum Balaputra Dewa Palembang, *Koleksi Arkeologika Museum Balaputra Dewa*, Palembang : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, 2010.

Olthof, W.L. (Penyusun), *Babad Tanah Jawi : Mulai dari Nabi Adam Sampai Pangeran Purbaya*, Yogyakarta : Narasi, 2016.

Pramasto, Arafah, "Kontribusi Syaikh Abdus Shamad Al-Palimbani pada Aspek Intelektual Islam di Nusantara Abad ke-18", Tsaqofah & Tarikh, Vol. 4 No. 2, Juli - Desember 2020.

Pramasto, Arafah, "Relijiusitas-Moderat dan Kemajuan perdagangan Palembang 1825-1856", Tribun Sumsel 19 Juni 2017.

Pramasto, Arafah, dkk., *Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya)*, Bandung:Ellunar Publisher, 2018.

Priyadi, Sugeng, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* , Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2012.

Ras, J.J., *Masyarakat dan Kesusatraan di Jawa*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014.

Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I : Tanah di Bawah Angin*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2014.

Sabdacarakatama, Ki, *Ensiklopedia Raja-Raja Tanah Jawa*, Yogyakarta : Narasi, 2010.

Storey, William Kelleher, *Menulis Sejarah:Panduan Untuk Mahasiswa* , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011.

Suandika, Tedi, Arafah Pramasto, "Perang 1659 dan Pengaruh Mataram Islam dalam Kemiliteran Palembang", Pagaralam Post pada 21 Desember 2017.

Yahya, Imam, *Tradisi Militer dalam Islam*, Yogyakarta : Logung, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Atsaru Al-Harb fi Al-Islam Dirasah Muqoronah*, Damaskus : Dar Al-Fikr,1962.h.43.